TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN: 2810-0395
e-ISSN: 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i4.6558

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK MELALUI POSYANDU DI RW 01 KELURAHAN PENUNGGANGAN UTARA

Analysis of Government Policy in Improving Maternal and Child Health Through *Posyandu* in RW 01, Penunggangan Utara Subdistrict

Risa Septiani[1], Ashrianni Zayyaan[2], Khikmawanto[3]
Universitas Yuppentek Indonesia
risaseptiani40@gmail.com; ashrianniz@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 18, 2025	Jun 16, 2025	Jun 28, 2025	Jul 3, 2025

Abstract

Basic healthcare services play a vital role in public health development, with *Posyandu* serving as a strategic community-based health service facility in Indonesia. This study aims to evaluate government support for Posyandu Cemara RW 01 using a qualitative approach through in-depth interviews. The focus of the study includes the provision of medical equipment, operational funding, and cadre training. The findings reveal that while the government has provided support in the form of medical tools and operational funds, gaps remain in the area of cadre training. The limited training and human resource development have led to inadequate service delivery skills among cadres, ultimately reducing public trust in the *Posyandu*. These findings underscore that the effectiveness of government support has not fully addressed the needs on the ground. The study concludes by highlighting the importance of formulating more responsive and sustainable policy strategies, particularly in enhancing cadre capacity, to

Tsaqofah journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

strengthen the role of *Posyandu* as a frontline institution in community healthcare delivery.

Keywords: Posyandu; Government Support; Cadre Training; Public Health; Basic Healthcare Services

Abstrak: Pelayanan kesehatan dasar memainkan peran penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat, dengan Posyandu sebagai salah satu sarana pelayanan berbasis komunitas yang strategis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dukungan pemerintah terhadap Posyandu Cemara RW 01 menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Fokus kajian meliputi penyediaan alat kesehatan, dana operasional, dan pelatihan kader. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memberikan dukungan berupa alat kesehatan dan dana operasional, masih terdapat kesenjangan dalam aspek pelatihan kader. Minimnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berdampak pada rendahnya keterampilan kader dalam memberikan layanan, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Posyandu. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas dukungan pemerintah belum sepenuhnya merespons kebutuhan di lapangan. Simpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya penyusunan strategi kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan kapasitas kader, guna memperkuat fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Posyandu; Dukungan Pemerintah; Pelatihan Kader; Kesehatan Masyarakat; Pelayanan Kesehatan Dasar

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan dasar merupakan fondasi penting dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu dan balita. Di Indonesia, Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan berbasis komunitas yang memiliki peran vital dalam mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat tingkat bawah. Keberadaan Posyandu di setiap RW atau desa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam pemantauan gizi anak, imunisasi, edukasi kesehatan, hingga pelayanan ibu hamil dan menyusui.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Posyandu sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan alat, minimnya pelatihan kader, hingga dana operasional yang belum mencukupi untuk kegiatan yang bersifat pengembangan. Isu ini juga ditemukan dalam kasus Posyandu Cemara RW 01, di mana dukungan pemerintah telah ada dalam bentuk penyediaan alat dasar seperti timbangan balita, alat ukur tinggi badan, tensimeter,

serta buku KIA. Pemerintah juga menyalurkan dana operasional dan secara berkala menjalankan program-program seperti imunisasi dan pemberian vitamin A. Meski demikian, dukungan tersebut masih belum mampu mencakup seluruh kebutuhan, terutama untuk kegiatan non-rutin yang memerlukan dana tambahan dan pelatihan lanjutan.

Dalam perspektif teori pelayanan publik dan desentralisasi (Osborne, 2020), keterlibatan pemerintah dalam mendukung lembaga pelayanan berbasis masyarakat harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya menyediakan alat dasar, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia (dalam hal ini kader Posyandu) memiliki kapasitas dan keterampilan yang memadai, serta bahwa mekanisme anggaran mampu menjawab kebutuhan lapangan secara responsif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui apakah dukungan yang diberikan pemerintah terhadap Posyandu benar-benar mendukung peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh, bukan hanya bersifat administratif atau simbolik.

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak menyoroti efektivitas Posyandu dalam menurunkan angka stunting atau meningkatkan cakupan imunisasi (Nuraini et al., 2021; Suryati, 2020). Namun, masih sedikit kajian yang secara khusus mengulas bagaimana strategi dan bentuk dukungan pemerintah mempengaruhi keberlangsungan dan pengembangan Posyandu secara praktis. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan melihat secara langsung realitas lapangan di Posyandu Cemara RW 01 dan menggali respons para pelaksana terkait ketercukupan dukungan dari pemerintah, baik dari sisi logistik, pendanaan, maupun pelatihan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan melalui pendekatan studi kasus yang bersifat lokal, tetapi memiliki relevansi luas. Dengan merujuk pada teori pelayanan publik dan konsep *governance* berbasis komunitas *(community-based governance)*, kajian ini menunjukkan bagaimana keberhasilan layanan kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada dinamika hubungan antara pelaksana layanan, pemerintah lokal, dan masyarakat itu sendiri. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan secara rinci bagaimana bentuk dukungan pemerintah dirasakan dan dimanfaatkan oleh pelaksana Posyandu di lapangan.

Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Posyandu Cemara RW 01 di Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dukungan berupa alat kesehatan, dana operasional, dan

pelatihan kader telah berkontribusi terhadap peningkatan layanan Posyandu. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah agar mampu merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan riil Posyandu sebagai mitra penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam atau rinci mengenai fenomena manusia yang telah ada, berlangsung, sedang berjalan dan akan datang. Menurut Sandelowski (2000), pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menyajikan penjelasan yang akurat mengenai fenomena tertentu sebagaimana adanya, tanpa manipulasi atau intervensi dari peneliti. Hal ini sejalan dengan pendapat Neergaard et al. (2009) yang menyatakan bahwa pendekatan ini sangat efektif untuk memahami fenomena dari sudut pandang pelaku langsung, terutama dalam konteks pelayanan publik seperti Posyandu. Fenomena yang diterangkan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah pada peningkatan kesehatan ibu dan anak yang dilakukan melalui kegiatan Posyandu Cemara di RW 01 Kelurahan Penunggangan. Jenis penelitian deskriptif karena akan membahas aspek-aspek peningkatan kesehatan ibu dan anak yang diatur mencakup aspek-aspek di pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data secara langsung dari lapangan dengan wawancara kepada pihak terkait, observasi kegiatan, dokumentasi.

Sesuai dengan jenis penelitian, penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena sosial secara natural dan mendalam, dan mendeskripsikan situasi yang sebenarnya di lapangan tanpa adanya manipulasi terhadap variabel penelitian. Pada konteks kelompok penelitian, peneliti berusaha untuk menangkap bagaimana peran kebijakan pemerintah diimplementasikan di Posyandu Cemara, dan bagaimana kader dan posyandu merasakan dampaknya. Jadi, pendekatan ini sangat relevan untuk pertanyaan penelitian "bagaimana" dan "mengapa" dalam pelaksanaan layanan kesehatan dasar di komunitas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain studi kasus tunggal, yaitu dengan memfokuskan penelitian pada Posyandu Cemara. Posyandu Cemara sendiri beralamat di RW 01 Kelurahan Penunggangan. Yin (1996) menyatakan bahwa studi kasus adalah pendekatan empiris untuk meneliti suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika

batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara tegas. Pendapat ini diperkuat oleh Tellis (1997) yang menyebut bahwa studi kasus lebih menekankan pada proses sistem tindakan, bukan sekadar individu atau institusi. Desain ini dipilih penulis karena memiliki keunikan dalam hal penelitian yang memungkinkan penulis untuk mendalami situasi secara rinci dan kontekstual. Oleh karena dengan menggali satu kasus yang menarik secara intensif, data yang dihasilkan akan bisa memberikan gambaran yang lebih utuh tentang interaksi antara kader, warga, dan pemerintah.

Dalam penentuan responden, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yang merupakan penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2010), teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam dari sumber data yang dianggap paling tahu dan paling terlibat dengan fenomena yang diteliti. Responden utama meliputi 5 orang kader Posyandu Cemara, 6 ibu balita datang rutin di Posyandu, 1 orang perwakilan dari kelurahan, dan 1 orang petugas yang dianggap oleh Puskesmas sebagai pembina wilayah. Responden tersebut memiliki pengalaman langsung dan pemahaman yang lebih dalam terhadap pelaksanaan kegiatan Posyandu serta peran pemerintah dalam mendukungnya.

Instrumen utama dalam pengumpulan data yaitu panduan wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan tujuan dan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka agar informan merasa lebih leluasa menyampaikan pendapatnya. Selain melakukan wawancara, peneliti juga memperhatikan dan mencatat kegiatan Posyandu langsung serta dokumentasi kejadian kejadian, contoh penimbangan berat badan bayi, penyuluhan gizi, dan keikutsertaan masyarakat. Dokumentasi yang diambil berupa foto kegiatan, jadwal layanan yang dapat disemarakan, laporan bulanan dari kader lingkungan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik. Prosedurnya melibatkan pengelompokan data sesuai dengan tema-tema utama yang terungkap dari hasil wawancara dan observasi. Sesuai dengan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2006), Tahapan analisis berikut: transkripsi data hasil wawancara, pengodean data, pengelompokan berdasarkan kategori tematik, lalu ditarik kesimpulan. Analisis data ini mengidentifikasi dan mensintesis pola-pola umum dalam bentuk dukungan dari pemerintah, kendala yang dihadapi kader, dan respons dari masyarakat ke layanan Posyandu. Deskripsi

hasil analisis dikompilasi secara deskriptif untuk menyajikan secara komprehensif dan kontekstual.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan Posyandu Cemara di RW 01 Kelurahan Penunggangan berjalan secara rutin setiap bulan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan balita, pemeriksaan tekanan darah ibu hamil, serta pencatatan data ke dalam buku KIA. Dari observasi dan wawancara, diketahui bahwa fasilitas dasar yang tersedia mencakup timbangan, alat pengukur tinggi badan, tensimeter, serta perlengkapan administrasi yang masih layak pakai dan digunakan dalam setiap kegiatan.

Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan tambahan seperti penyuluhan atau edukasi keluarga, yang hanya bisa dilakukan jika ada dukungan dari RT/RW atau sumbangan warga. Kader juga mengungkapkan kebutuhan akan alat medis tambahan seperti alat pengukur hemoglobin, alat cek gula darah, dan termometer digital yang hingga saat ini belum tersedia. Ketidak tersediaan alat tersebut dinilai menghambat upaya pemantauan kesehatan yang lebih akurat. Selain itu, pelatihan untuk kader Posyandu pernah dilakukan, namun tidak secara berkala. Para kader berharap ada pelatihan yang lebih rutin dan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di lapangan.

Ringkasan hasil penelitian ini juga disusun dalam bentuk tabel yang memuat informasi tentang jadwal kegiatan, fasilitas utama, keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan tambahan, belum tersedianya alat medis modern, serta kondisi pelatihan kader yang belum berkesinambungan.

Beberapa data yang masih kurang antara lain: kegiatan tambahan tidak bisa dilaksanakan secara rutin karena tidak ada anggaran tetap, alat medis penting belum tersedia, serta pelatihan kader yang tidak dilakukan secara berkelanjutan dan belum mencakup isu-isu baru. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan dasar Posyandu berjalan, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan lapangan dan dukungan yang tersedia.

Tabel 1. Pernyataan

Pertanyaan	Ya	Tidak	Keterangan
Apakah pemerintah sudah menyediakan fasilitas dasar posyandu?	Ya		Alat seperti timbangan, pengukur tinggi badan, tensi, dan buku KIA tersedia dan digunakan
Apakah dana operasional dari pemerintah sudah mencukupi untuk semua kegiatan?		tidak	Dana hanya cukup untuk kegiatan rutin bulanan, belum mencakup kegiatan tambahan seperti penyuluhan
Apakah program imunisasi dan vitamin A berjalan dengan baik?	Ya		Program tersebut berjalan rutin dan bermanfaat untuk masyarakat setempat
Apakah pelatihan kesehatan dari pemerintah dilakukan secara rutin?		tidak	Pelatihan pernah dilakukan, tapi belum rutin dan belum menyentuh semua aspek yang dibutuhkan
Apakah alat-alat kesehatan tambahan telah disediakan oleh pemerintah?		tidak	Alat seperti cek hemoglobin dan gula darah belum tersedia di posyandu cemara
Apakah respons pemerintah cepat untuk kebutuhan mendesak?	Ya		Untuk kebutuhan mendesak, seperti obat atau alat ringan, puskesmas cepat dalam merespons
Apakah pengadaan alat jangka panjang dari pemerintah berjalan dengan lancar?		tidak	Pengadaan butuh waktu lama karena harus melalui prosedur anggaran resmi
Apakah pemerintah terlibat aktif dalam pengembangan posyandu?		tidak	Keterlibatan masih terbatas pada penyediaan dasar, masih belum sampai ke memberikan dukungan pengembangan lanjutan
Apakah pemerintah mendorong kerja sama posyandu dengan organisasi lokal?	Ya		Pemerintah membuka peluang kolaborasi antara posyandu dengan RT/RW, karang taruna, PPK setempat
Apakah pemerintah menyediakan mekanisme pelaporan masalah dari kader kepada instansi terkait?	Ya		Ada saluran pelaporan, tetapi masih belum terstruktur dengan baik atau belum ditindaklanjuti secara cepat

PEMBAHASAN

Bagian ini membahas secara mendalam hasil yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara dengan kader Posyandu Cemara RW 01. Penulis menganalisis makna dari hasil temuan, mengaitkannya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta membandingkan dengan temuan dari literatur sebelumnya. Selain itu, pembahasan ini juga mengevaluasi kontribusi hasil temuan terhadap pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dan menguraikan keterbatasan dalam penelitian.

Posyandu Cemara RW 01 menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang cukup baik, dengan rutinitas bulanan yang sudah berjalan secara konsisten. Pelayanan yang diberikan mencakup pemeriksaan berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan pemantauan kehamilan serta pertumbuhan balita melalui buku KIA. Kegiatan dilakukan oleh kader-kader posyandu

secara sukarela dengan komitmen yang tinggi, yang menjadi kunci keberlanjutan layanan di tengah keterbatasan sumber daya. Fasilitas dan alat yang digunakan terbilang standar, seperti timbangan, pengukur tinggi badan, tensimeter, serta alat tulis dan buku catatan. Semua alat ini berfungsi dan masih bisa digunakan, namun tidak mencakup alat medis yang dapat mendeteksi kondisi yang lebih kompleks, seperti kadar hemoglobin (Hb), gula darah, atau suhu tubuh dengan presisi. Ketiadaan alat ini menjadi hambatan dalam upaya deteksi dini terhadap gangguan kesehatan seperti anemia, diabetes, atau infeksi.

Selain itu, dukungan dana dari pemerintah masih terbatas, hanya mencakup kebutuhan operasional dasar. Untuk kegiatan tambahan seperti penyuluhan gizi, edukasi keluarga, atau kegiatan sosial tematik, para kader harus mencari sumber dana alternatif. Ini sering kali dilakukan melalui swadaya masyarakat, sumbangan sukarela, kerja sama RT/RW, atau inisiatif warga. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kegiatan sangat bergantung pada partisipasi sosial, bukan pada sistem yang terstruktur secara kuat dari tingkat atas. Dari sisi peningkatan kapasitas kader, pelatihan pernah diadakan dan dinilai sangat membantu, khususnya dalam hal pemahaman tentang gizi anak. Namun, pelatihan tersebut tidak dilakukan secara rutin, dan materinya belum mengikuti perkembangan terbaru mengenai kesehatan ibu dan anak, maupun pendekatan berbasis teknologi. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dan bekal kemampuan kader dalam meresponsnya.

Temuan ini memiliki keterkaitan erat dengan berbagai studi tentang posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan berbasis masyarakat. Dalam studi oleh Suhartono et al. (2020), disebutkan bahwa keberhasilan posyandu dalam memberikan pelayanan KIA sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana, kualitas kader, serta dukungan pemerintah daerah. Hal serupa juga disampaikan oleh Utami (2018) yang menyoroti bahwa sebagian besar posyandu di wilayah perkotaan dan semi-perkotaan masih menghadapi keterbatasan peralatan medis serta pendanaan, sehingga kegiatan pengembangan layanan seperti penyuluhan, skrining, dan deteksi dini menjadi sulit dilakukan.

Sementara itu, literatur lain menekankan pentingnya pendekatan multi-sektor, di mana posyandu tidak hanya dilihat sebagai entitas layanan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan pembangunan keluarga. Jika hanya bergantung pada dana operasional dasar, posyandu akan sulit berkembang menjadi lembaga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Temuan dari Posyandu Cemara RW 01 mencerminkan

kondisi umum tersebut, dengan tantangan khas berupa ketimpangan antara tuntutan di lapangan dan ketersediaan dukungan sistemik dari struktur pemerintahan.

Secara praktis, hasil ini menunjukkan bahwa posyandu tetap menjadi instrumen penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya dalam upaya promotif dan preventif. Namun, keberlanjutan dan efektivitas posyandu sangat tergantung pada kekuatan sosial masyarakat lokal dan kapasitas kader, yang tidak selalu dapat diandalkan tanpa dukungan eksternal yang stabil.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah pentingnya peningkatan alokasi anggaran yang tidak hanya fokus pada alat dasar, tetapi juga mencakup alat medis diagnostik ringan, pelatihan kader secara periodik, serta program digitalisasi sistem posyandu untuk mempercepat pelaporan dan analisis data. Dari sisi teoretis, studi ini memperkuat teori partisipatif dalam pembangunan kesehatan, bahwa keberhasilan intervensi di tingkat komunitas sangat ditentukan oleh kombinasi antara dukungan struktural dan modal sosial masyarakat.

Pembahasan ini masih memiliki sejumlah keterbatasan dalam hal ruang lingkup informasi yang dapat disampaikan secara menyeluruh. Salah satu keterbatasan utama adalah belum tergambarnya secara detail kondisi lingkungan sekitar Posyandu, seperti aksesibilitas lokasi, kepadatan penduduk, karakteristik sosial ekonomi warga, dan faktor lingkungan fisik lainnya yang mungkin turut mempengaruhi partisipasi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Padahal, lingkungan sekitar sering kali menjadi faktor pendukung atau penghambat yang cukup signifikan dalam pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Selain itu, aspek pemanfaatan teknologi dalam mendukung kegiatan posyandu juga belum dijelaskan secara spesifik. Saat ini, banyak posyandu mulai beralih ke pencatatan digital atau menggunakan aplikasi kesehatan untuk mempermudah pemantauan tumbuh kembang anak, pelaporan data, dan koordinasi dengan puskesmas. Dalam pembahasan ini, belum terlihat sejauh mana Posyandu Cemara sudah menerapkan pendekatan digital atau masih sepenuhnya manual. Padahal, informasi tersebut penting untuk melihat kesiapan posyandu dalam menghadapi tantangan zaman dan integrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.

Keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi validitas temuan yang ada, tetapi menjadi catatan penting untuk perbaikan dan pengembangan kajian ke depan, agar pembahasan mengenai posyandu dapat disajikan secara lebih komprehensif, mendalam, dan berorientasi pada penguatan sistem layanan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penemuan dan pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Posyandu Cemara di RW 01 Kelurahan Penunggangan telah berjalan secara rutin dengan pelaksanaan kegiatan dasar seperti penimbangan balita, pengukuran tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah ibu hamil, serta pencatatan data kesehatan dalam buku KIA, didukung oleh fasilitas dasar yang masih memadai dan digunakan secara optimal. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tambahan seperti penyuluhan dan edukasi keluarga mengalami kendala karena tidak tersedianya anggaran tetap dan ketergantungan pada dukungan RT/RW serta sumbangan warga, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara rutin. Selain itu, keterbatasan fasilitas medis berupa belum tersedianya alat pengukur hemoglobin, alat cek gula darah, dan termometer digital menghambat upaya pemantauan kesehatan yang lebih akurat dan komprehensif. Pelatihan kader Posyandu yang pernah dilaksanakan juga belum berjalan secara berkelanjutan dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan di lapangan, sehingga kader membutuhkan pelatihan yang lebih rutin dan terstruktur. Kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara kebutuhan operasional Posyandu dengan dukungan fasilitas, anggaran, dan pelatihan yang tersedia. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas layanan Posyandu, sangat diperlukan peningkatan dukungan berupa penyediaan anggaran tetap, pemenuhan alat medis yang memadai, serta pelatihan kader secara berkala agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Allyreza, R., & Jumiati, I. E. (2023). Strategi Komunikasi Kader Posyandu Sebagai Upaya Perubahan Perilaku Keluarga (Ibu) dalam Penurunan Stunting di Desa Ramaya Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang. *Bantenese : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(1), 1–14. https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i1.6079

Fitriani, Y., Setioko, S., Mirnawati, M., Yusuf, M., Putri, H. W., Setiani, A., Delvina, E., & Catrina, L. (2023). Peran Posyandu Sebagai Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jaya Asri. *Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat Multikultural*, *1*(3), 138–144. https://doi.org/10.57152/batik.v1i3.1142

Hafifah, N., & Abidin, Z. (2020). Peran Posyandu dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Sukawening, Kabupaten Bogor. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, *2*(5), 893–900. https://journal.ipb.ac.id/index.php/pim/article/view/31742

Lestari, P., Pralistami, F., Ratna, D., Hamijah, S., & Harahap, R. A. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *22*(3), 2227.

https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2789

Pundenswari, P. (2017). Analisa Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik bidang Kesehatan terhadap Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Publik : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, *11*(1), 13–21. www.jurnal.uniga.ac.id

Rahmadani, S., & Lubis, S. (2023). Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, *9*(1), 188. https://doi.org/10.29210/1202322804

Stikes, A. I., & Majalengka, Y. (2016). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kunjungan Balita Ke Posyandu*. *1*(2), 16–29.